



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**JL SETIABUDI NOMOR 1 TEMANGGUNG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dimulai tahun 2019 sampai tahun 2023.

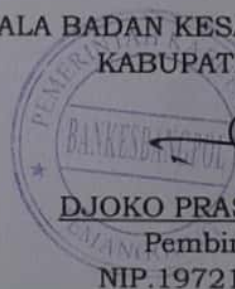
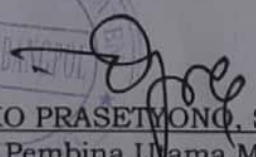
Dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
  
DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19721126 199203 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BANKESBANGPOL TH 2023 .....</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bankesbangpol Temanggung Tahun 2023...	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bankesbangpol Kab. Temanggung.....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	44
2.6 Inovasi Bankesbangpol Kabupaten Temanggung .....	44
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bankesbangpol Kab. Temanggung.....	46
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Program dan kegiatan Bankesbangpol Kab. Temanggung .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

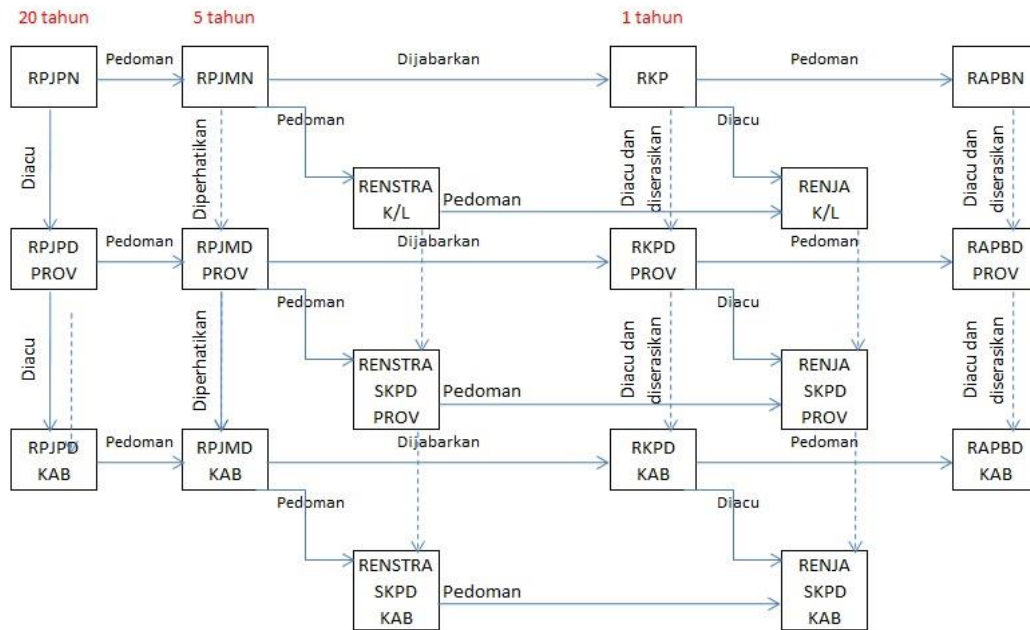
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan



dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:





																Predikat	Sangat Tinggi			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				97.576.700	100	1.411.687.750	1.365.387.250		84.277.500		1.178.236.250		88.830.950		9.133.300	0	1.360.478.000	0	99,64
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87,00		87			87,21		87,21		87,21		87,21		87,21		100	
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30,00		30		25,00		32,73		32,73		32,73		32,73		32,73		100
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30,00		30		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		100
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum/ Pemilihan	kegiatan		97.576.700	20	1.411.687.750	1.365.387.250	10	84.277.500	8	1.178.236.250	1	88.830.950	1	9.133.300	20	1.360.478.000	100	99,64



		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100		100		100		100		100		100		100		100				
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya	kegiatan			8	2.514.045.640	538.045.640	1	15.919.500	3	217.886.500	2	206.163.300	2	46.739.200	8	486.708.500	100	90,46		
																				Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	
																					Predikat	Sangat Tinggi
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>						2.244.400.000	756.000.000		1.016.999.998		197.391.500		227.716.500		86.498.500		438.810.270		950.416.770		93,45
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100		100			100		100		100		100		100		100			
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%			10			0		10,4		11,1		11,10		11,10		100			

		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%		35			0		35		36		38		38		100		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		kegiatan		14	736.000.000	1.006.999.998	2	195.535.000	4	223.724.500	2	84.597.500	6	436.570.270	14	940.427.270	100,00	93,39	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah		kegiatan		12	20.000.000	10.000.000	2	1.856.500	4	3.992.000	2	1.901.000	4	2.240.000	12	9.989.500	100,00	99,90	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan		100			
																	<b>Predikat</b>	<b>Sangat Tinggi</b>		
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat			1.177.394.000	100	282.250.000	308.950.000	25	44.401.452	25	51.197.783	25	354.235.596	149.646.675	25	269.148.806	100	87,12	

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		daerah (ex BAU)																		
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		bul an		1	0	0	0	0	0	0	1	292.130.200	0	4.202.500	1	296.332.700	100,00		
8010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		uni t		6		34.200.000						6	34.000.000	6	34.000.000	100,00			
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		bul an		12	1.250.000	1.250.000	3	477.500	3	225.000	3	536.500	3	0	12	1.239.000	100,00	99,12	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bul an		12	5.000.000	5.000.000	3	1.848.400	3	1.023.100	3	105.000	3	2.017.000	12	4.993.500	100,00	99,87	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bul an		12	40.000.000	4.314.000	3	613.000	3	1.119.000	3	1.904.050	3	674.200	12	4.310.250	100,00	99,91	
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		bul an		12	6.500.000	6.500.000	3	661.000	3	985.300	3	1.817.150	3	3.342.000	12	6.805.450	100,00	104,70	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bul an		12	15.000.000	15.000.000	3	2.600.500	3	3.087.500	3	7.288.000	3	10.807.243	12	23.783.243	100,00	158,55	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik		bul an		12	24.750.000	18.300.000	3	3.934.024	3	3.477.399	3	3.669.570	3	3.249.414	12	14.330.407	100,00	78,31	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bul an		12	2.500.000	2.500.000	3	0	3	420.000	3	1.410.000	3	600.000	12	2.430.000	100,00	97,20	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		bul an		12	126.000.000	133.636.000	3	29.268.811	3	33.042.732	3	33.042.729	3	34.877.692	12	130.231.964	100,00	97,45	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		bul an		12	55.000.000	67.000.000	3	4.623.717	3	5.592.952	3	10.582.397	3	39.236.626	12	60.035.692	100,00	89,61	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bul an		12	3.250.000	18.250.000	3	274.500	3	1.220.000	3	1.750.000	3	14.795.000	12	18.039.500	100,00	98,85	

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan		12	3.000.000	3.000.000	3	100.000	3	1.004.800	3	0	3	1.845.000	12	2.949.800	100,00	98,33			
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00			
																		Predikat	Sangat Tinggi			
<b>Jumlah</b>						5.079.670.700	5.051.183.390	3.399.763.736		365.330.452		1.679.054.533		739.988.096				3.236.319.126				
																		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH</b>		100,00	95,19	
																		<b>PREDIKAT</b>		Sangat Tinggi		
																		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>		100,00		
																		<b>PREDIKAT</b>		Telah Tercapai		



Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
s.d Triwulan I Tahun 2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN	SAT UAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
							I		II		III		IV						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
01.02	PRGOGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				48.381.100	415.000.000		14.096.000		0		0		0		14.096.000		3,40	
		Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62			100		0,00		0,00				0,00		0		
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkn pembinaan wawasan kebangsaan	%	10			10,38		0,00		0,00				0,00		0		
01.02.2. 01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	doku men	2	48.381.100		0		0		0		0		0	0	0	0,00	
8.1.2.20 1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Oran g	90		415.000.000	8	14.096.000							8	14.096.000	8,8888 89	3,40	





8.01.05. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	300	836.597.640	300.000.000	7	966.000	0	0	0	0	0	7	966.000	2,33	0,32
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan	2,33	
															Predikat	Sangat Rendah	
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>				1.135.000.000	560.000.000		89.784.000		0		0		0	89.784.000		16,03
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100			100		0		0			100		100	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10			1,04		0		0			1,04		10	
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35			70		0		0			70		100	



RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		bulan	12	327.000.000	175.000.000	2	2.215.000	0		0		0		2	2.215.000	16,67	1,27
8.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		bulan	12	2.500.000	2.500.000	3	543.500	0		0		0		3	543.500	25,00	21,74
8.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bulan	12	7.000.000	7.000.000	3	2.293.000	0		0		0		3	2.293.000	25,00	32,76
8.01.01. 2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bulan	12	6.750.000	6.750.000	3	1.013.800	0		0		0		3	1.013.800	25,00	15,02
8.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		bulan	12	12.000.000	12.000.000	3	2.847.300	0		0		0		3	2.847.300	25,00	23,73
8.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	30.000.000	29.979.000	3	3.017.500	0		0		0		3	3.017.500	25,00	10,07
8.01.01. 2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik		bulan	12	20.000.000	20.000.000	3	4.444.045	0		0		0		3	4.444.045	25,00	22,22
8.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan	12	5.000.000	5.000.000	0	0	0		0		0		0	0	0,00	0,00
8.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan	12	133.636.000	133.636.000	3	38.565.696	0		0		0		3	38.565.696	25,00	28,86
8.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		bulan	12	32.000.000	32.000.000	3	6.339.570	0		0		0		3	6.339.570	25,00	19,81
8.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan	12	150.000.000	24.998.900	0	0	0		0		0		0	0	0,00	0,00



RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan	12	5.000.000	5.000.000	3	3.102.000	0		0			3	3.102.000	25,00	62,04	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan		20,14	
															Predikat		Tinggi	
<b>Jumlah</b>					<b>4.587.552.590</b>	<b>3.430.551.750</b>		<b>180.343.361</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>178.128.361</b>			
															<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH</b>		12,14	5,19
															<b>PREDIKAT</b>		<b>Sangat Rendah</b>	
															<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>		71,06	
															<b>PREDIKAT</b>		<b>Upaya Keras</b>	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - f. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
  - g. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  - h. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - j. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **sangat memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya indeks gotong royong;  
Capaian Kinerja : 100 % kategori sangat memuaskan.
2. Meningkatnya indeks toleransi  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori sangat memuaskan.

Dari Tabel 2.1 dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan I Tahun 2023 (**Laporan IKPD**)  
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d TW I 23 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indek Toleransi	%	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,8	4	4,5	4,5	4,5	100	TT
2	Indeks Gotong Royong	%	3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33	4,33	4,33	100	TT
3	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	60	60	62	62	62	0	0	0	65	70	100	TT
4	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	10	10	10	10	10	30,7	0	4,84	58,48	9,34	93,4	UK
5	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87	87	87	87	87,20	87,21	87,21	87,21	87,21	100	TT
6	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30	30	30	30	25	25	25	32,73	32,73	100	TT
7	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30	30	30	30	31,11	33,33	33,33	33,33	33,33	100	TT
8	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	100	TT
9	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
10	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
11	Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	5	10	10	10	10	0	68,60	36,68	11,07	9,34	93,4	UK

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d TW I 23 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
12	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	30,3	35	35	35	35	75	0	0	38	70	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 10 indikator terdiri dari :
  - a. **Indek Toleransi**  
 Capaian indeks toleransi di triwulan I tahun 2023 masih menggunakan capaian tahun 2022 karena perhitungan untuk tahun 2023 belum selesai. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya program kegiatan di Badan Kesbangpol mendukung tercapainya indeks toleransi. Adat istiadat, budaya, dan tingginya rasa tepo seliro juga mendorong indeks toleransi yang tercipta. Upaya Badan Kesbangpol dalam meningkatkan indeks toleransi adalah dengan penguatan forum kerukunan umat beragama (fkub) dan penguatan peran aktor lokal untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat.
  - b. **Indeks Gotong Royong**  
 Capaian indeks gotong royong di triwulan I tahun 2023 masih menggunakan capaian tahun 2022 karena perhitungan tahun 2023 belum selesai. Faktor pendorong tercapainya indeks gotong royong adalah budaya masyarakat Temanggung yang masih kental dengan tolong menolong dan percaya terhadap sesama. Upaya Badan Kesbangpol dalam menjaga budaya gotong royong adalah dengan melaksanakan kegiatan yang dapat menjaga budaya gotong royong di masyarakat seperti bakti sosial
  - c. **Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan**  
 Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebaran wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.
  - d. **Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya**  
 Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan

masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran demokrasi pada masyarakat Temanggung. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Kegiatan sosialisasi atau penyebar luasan informasi pemilu bagi masyarakat.

- e. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik  
Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kesetaraan gender, mengangkat kaum perempuan untuk sejajar dengan pria. Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggapan masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan lebih memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Upaya Badan Kesbangpol dalam pencapaian perempuan yang menjadi pengurus di partai politik adalah dengan pengembangan demokratisasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan melalui pendidikan politik bagi perempuan.
- f. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD  
Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat khususnya perempuan mulai paham dengan politik dan memiliki keinginan untuk menjadi anggota dewan. Faktor penghambat indikator tersebut adalah sudut pandang pemikiran masyarakat desa bahwa perempuan bukan sebagai pemimpin. Upaya Badan Kesbangpol dalam pencapaian Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD adalah dengan pengembangan demokratisasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan melalui pendidikan politik bagi perempuan.
- g. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan  
Faktor pendukung presentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan adalah tingginya kesadaran masyarakat untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Rekomendasi untuk indikator ini adalah dengan melakukan pembinaan berkala bagi FKUB di kecamatan agar tercipta koordinasi dengan FKUB Kabupaten
- h. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi  
Faktor pendukung indikator tersebut adalah adanya tim

untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.

- i. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah

Faktor pendukung indikator tersebut adalah adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.

- j. Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan pencegahan narkoba. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

2. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 indikator terdiri dari :

- a. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman

Faktor pendorong tercapainya persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

- b. Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Faktor pendukung tercapainya presentase desa/ kelurahan yang mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan



narkoba adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan pencegahan narkoba. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

### 2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari Indikator Strategis dan Indikator Program. Indikator program terdiri dari Data Pokok Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dan Data Pokok Bidang Kesatuan Bangsa, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Indikator Strategis

##### a. Indeks Toleransi

Realisasi Indeks Toleransi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	Na	3,15	0,64	4,15	4,17
Realisasi	Na	0,828	4	4,5	4,5

##### b. Indeks Gotong Royong

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	Na	3,15	0,64	4,21	4,21
Realisasi	Na	4,15	0,83	4,33	4,33

#### 2. Indikator Program

##### 2.1 Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

###### 1) Presentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya

Untuk mengetahui hal tersebut digunakan rumus Jumlah pemilih yang hadir di TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan, dikalikan 100%.

Prosentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya

dalam pemilu legislatif dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG Tahun 2018 s.d 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS	485.608	529.859	529.859	529.859	529.859	529.859
2	Jumlah Pemilih tetap secara Keseluruhan	582.486	607.598	607.598	607.598	607.598	607.598
3	Prosentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya	83,36 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %

Sumber : Diambil dari Sertifikat hasil perhitungan suara (DB) pada pelaksanaan pemilu / KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Temanggung Tahun 2021

2) Prosentase Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Politik

Keterwakilan perempuan di lembaga politik adalah jumlah perempuan yang berperan serta aktif di lembaga politik.

Untuk mengetahui persentasenya dapat digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah pengurus partai politik perempuan dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100, Maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Prosentase perempuan yang menjadi pengurus di partai politik yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Tahun 2018 sd 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengurus partai politik perempuan	88	98	98	98	91	91
2	Jumlah seluruh pengurus partai politik	388	392	392	392	278	278
3	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	22,68	25	25,00	25,00	32,73	32,73

Sumber: Badan Kesbangpol Temanggung 2022

Jumlah Perempuan menjadi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang mempunyai wakil di DPRD Hasil Pemilu 2019, sbb:

No	Nama Partai	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	PDIP	12	7	19
2	PKB	19	8	27
3	Golkar	57	13	70
4	Gerindra	10	7	17
5	PAN	15	10	25
6	PPP	17	8	25
7	PKS	6	4	10
8	Hanura	14	10	24
9	Nasdem	15	12	27

10	Demokrat	22	12	34
	<b>TOTAL</b>	<b>187</b>	<b>91</b>	<b>278</b>

Sumber : Bidang Politik dan Ormas Bankesbangpol 2023

### 3) Prosentase Keterwakilan Perempuan Di DPRD

Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota DPRD dikalikan 100% . Diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD Th 2018 s.d 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	14	15	15	15	15
2	Jumlah kursi Total keanggotaan di DPRD	45	45	45	45	45
3	Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD	31%	33%	33%	33%	33%

Sumber: DPRD Kabupaten Temanggung

Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD Tahun 2019 -2024 sebanyak 15 orang dari total kursi anggota DPRD sebanyak 45 orang. Hal ini telah diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu mengenai 30% unsur keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik di Kabupaten Temanggung sbb:

NO	NAMA	PARTAI
1	IKA RIZKIWATI,SE	PDIP
2	DWI LINDA WATI, SH, MH	GOLKAR
3	UMI FADHILAH	NASDEM
4	SITI MARGO LESTARI	HANURA
5	HERNANDIA HAPPY SAFITRI	PDIP
6	PERMATRIYDANI W, S.HI	PKS
7	TRI EKO WASTI	PKB
8	E. INTAN KURNIASARI,SE, M.Acc	PDIP
9	INDAH CAHYANI,S.Sos	GERINDRA
10	YENI KUSNITA	GERINDRA
11	ELYNAWATI .S.Pd	PKS
12	Dra.TITIK WINARTI	PDIP
13	Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag	NASDEM
14	Hj.UMI TSUWAIBAH ,S.Ag.M.Si	PKB
15	DWI SULISTYOWATI	PDIP

### 4) Cakupan Terbentuknya FKUB di Kecamatan

FKUB adalah Forum Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Temanggung. Untuk menghitung prosentase

cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada, di kali 100%. Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2018 s.d 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	0	20
2	Jumlah kecamatan di kab. Temanggung	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	0	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di kecamatan hanya dilakukan 1 kali di masing-masing kecamatan pada tahun 2022.

## 2.2 Bidang Kesatuan Bangsa

### 1. Persentase Sekolah Yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan

Pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung adalah salah satu upaya yang dilakukan Bankesbangpol dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada generasi muda yang masih berada di bangku sekolah. Jenjang sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan adalah sekolah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung.

Adapun untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi jumlah sekolah yang ada, dikalikan 100%.

**Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan Tahun 2018- 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	0	0	0	52
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	Na	80	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	0	0	0	65

Pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah dengan daftar sekolah sbb:

1.	SMA Bhakti Karya Kaloran	29	SMK Muh 1 Temanggung
2.	SMA Harapan Bangsa Kaloran	30	SMK Mutiara Mandiri Tmg
3	SMA Islam Kandangan	31	SMK NU Temanggung
4	SMA Islam Sudirman	32	SMK N 1 Temanggung
5	SMA IT Istiqomah Tembarak	33	SMK N 2 Temanggung
6	SMA Kristen Shekinah Temanggung	34	SMK N Bansari
7	SMA Miftakhul Muhtadin Montessori Kaloran	35	SMK N Jumo
8	SMA Muhammadiyah 1 Tmg	36	SMK N Pringsurat
9	SMA N 1 Candiroto	37	SMK N Tembarak
10	SMA N 1 Parakan	38	SMK PGRI Kedu
11	SMA N 1 Pringsurat	39	SMK Swadaya
12	SMA N 1 Temanggung	40	MA Al Maliki Temanggung
13	SMA N 2 Temanggung	41	MA Assalaam Kranggan
14	SMA N 3 Temanggung	42	MAN Temanggung
15	SMA Nur Lintang Kedu	43	MAS Al Huda
16	SMA PGRI Temanggung	44	MAS Al Mu'min Muhammadiyah
17	SMK 17 Parakan	45	MAS Darul Falah Pringsurat
18	SMK 17 Temanggung	46	MAS Darul Muttaqin
19	SMK Al Mumin Muhammadiyah	47	MAS D-Baito Sunan Plumbon
20	SMK Anwarus Solichin Kranggan	48	MAS Hidayatullah
21	SMK Bhumi Phala Parakan	49	MAS Ma'arif Darul Aman
22	SMK Darul Falach Candiroto	50	MAS Ma'arif Gemawang
23	SMK DR Sutomo Temanggung	51	MAS Miftahul Huda
24	SMK Eyyzul Moslem Bulu	52	MAS Mu'allimin Kandangan
25	SMK Ganesa Satria 4 Kedu		
26	SMK HKTi Temanggung		
27	SMK Jenderal Bambang Sugeng		
28	SMK Muhammadiyah Ngadirejo		

2. Cakupan Desa/ Kelurahan Yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan pada desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung adalah salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada elemen masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Adapun untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut:

Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di bagi jumlah Desa yang ada dikali 100%.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2018 s.d 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	23	3	0	14	169
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	7,95	1,03	0	4,8	58,48

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Faktor pendorong tercapainya persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
  - a. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan.

Hal ini disebabkan karena sub kegiatan yang mewadahi kegiatan tersebut tidak ada dalam DPA tahun 2022, sehingga sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain baik yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan instansi lain.

- b. Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisai di desa/kelurahan akan dilaksanakan pada triwulan ke tiga tahun 2023.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

- Adanya sub kegiatan yang tidak dimunculkan dalam DPA tahun 2023 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal
- Berdasarkan hal tersebut di diharapkan agar sub kegiatan yang menaungi kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dimunculkan kembali.

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu sejumlah 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (memunculkan kembali karena pada tahun 2022 sub kegiatan ini tidak ada)

2. Terdapat penambahan anggaran sub kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.1 berikut:



Tabel 2.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
						5.889.980.875							56.312.325.525
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>2.984.980.875</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>3.048.655.875</b>
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					<b>2.643.480.875</b>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					<b>2.643.480.875</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang	<b>2.643.480.875</b>		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24	orang	2.643.480.875
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					<b>73.000.000</b>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					<b>136.675.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	paket	3.000.000
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	paket	63.675.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	8.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor	12	paket	8.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	7.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	paket	7.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Temanggung	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	Bulan	12.500.000		Fasilitasi Kunjungan Tamuh		Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	laporan	12.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	42.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	42.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					215.000.000		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					<b>215.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Temanggung	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	23.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	laporan	30.910.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	6.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	laporan	6.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Temanggung	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	186.000.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	laporan	178.089.600
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>53.500.000</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>53.500.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Temanggung	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	40.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	unit	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Temanggung	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Bulan	6.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	2	unit	6.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	Bulan	7.500.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	unit	7.500.000
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					<b>460.000.000</b>			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				-	850.000.000
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					460.000.000			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					850.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Temanggung	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			0			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	dokumen	100.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			460.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90	orang	750.000.000
	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>					<b>1.500.000.000</b>			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>				-	51.486.669.650

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>					1.500.000.000			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>			-	51.486.669.650	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	Temanggung	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			1.500.000.000			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			12	dokumen	51.486.669.650
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>						30.000.000			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>			-	30.000.000	
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>						30.000.000			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>			-	30.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Temanggung	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			30.000.000			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			11	laporan	30.000.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>						320.000.000			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>			-	320.000.000	
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>						320.000.000			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>			-	320.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Temanggung				320.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			300	orang	320.000.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>						595.000.000			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>			-	595.000.000	

<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>						<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>							
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				585.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100	orang	585.000.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12	laporan	10.000.000

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.2

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA / Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Desa Mudal	Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan bahaya narkoba	1 paket	Rp. 20.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Desa Ngeplak	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menangani konflik di masyarakat	1 paket	Rp. 35.000.000

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 .3

Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pembaharuan data ormas door to door.	Kesbangpol, ormas	APBD	Jemput bola pembaruan data ormas	Data ormas	Tersedianya informasi keberadaan dan kepengurusan ormas yang up to date.	Kesbangpol - 2021

2	Desk pembuatan LPJ Banpol dari partai ke partai	Kesbangpol, parpol	APBD	Bankesbangpol sebagai fasilitator bantuan keuangan parpol memiliki inisiatif untuk melakukan desk dari partai ke partai.	LPJ yang sesuai	Tersusunnya LPJ banpol yang sesuai dengan aturan	Kesbangpol - 2021
---	---	--------------------	------	--	-----------------	--	-------------------

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*(mengambil dari dokumenn renstra 2024-2026)*

Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			Kondisi akhir 2024
				2024	2025	2026	
1.	Tujuan: Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	%	4,2	4,21	4,22	4,2
2.	Sasaran: Tertanganinya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100
3	Program:						
	1.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	80	90	100	80
	2.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	80	90	100	80
	3.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	13,33	13,33	13,33	13,33
	4.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	100
	5.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.



Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA</b>	<b>56.312.325.525</b>	A	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA</b>	<b>56.312.325.525</b>	0
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.048.655.875</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.048.655.875</b>	0
a	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.643.480.875</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.643.480.875</b>	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.643.480.875		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.643.480.875	0
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		0
		<b>136.675.000</b>			<b>136.675.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.675.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.675.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000	0
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.000.000</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.000.000</b>	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.809.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.809.600	0
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.500.000</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.500.000</b>	0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	0
<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	850.000.000		<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	850.000.000	0
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	850.000.000		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	850.000.000	0
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000	0
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750.000.000	0
<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	51.486.669.650		<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	51.486.669.650	0
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	51.486.669.650		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	51.486.669.650	0
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	51.486.669.650		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	51.486.669.650	0
<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	30.000.000		<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	30.000.000	0
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	30.000.000		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	30.000.000	0

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000	0
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	320.000.000			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	320.000.000	0
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	320.000.000			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	320.000.000	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320.000.000	0
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	595.000.000			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	595.000.000	0
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	595.000.000			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	595.000.000	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	585.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	585.000.000	0
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	0

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan berdasarkan program, sub kegiatan dan pagu indikatif RKPD.

Tabel 4.2  
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung  
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK K SASA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB		
							TA RG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>56.312.325.525,00</b>								<b>7.143.281.625,00</b>	
	<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>56.312.325.525,00</b>								<b>7.143.281.625,00</b>	
	<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>56.312.325.525,00</b>								<b>7.143.281.625,00</b>	
1.	<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			-	<b>3.048.655.875,00</b>						-		<b>2.847.980.875,00</b>	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN</i>	-			-	2.643.480.875,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	2.643.480.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				24 Orang/ bulan	2.643.480.875,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		2.643.480.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah</i>	-			-	136.675.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	3.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	63.675.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.500.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.500.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	42.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			-	215.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	-	36.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	30.910.400,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	178.089.600,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			-	53.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	-	53.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	40.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	6.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	7.500.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<i>Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan</i>	-			-	<b>850.000.000,00</b>						-	<b>850.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	-			-	850.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				90 Orang	750.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	- Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya - Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik - Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	-			-	51.468.669.650,00						-	2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	51.468.669.650,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	-	2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				12 Dokumen	51.468.669.650,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	- Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	-			-	30.000.000,00						-	30.300.750,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>	-			-	30.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas	-	-	30.300.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan</i>				11 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen	-		30.300.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<i>Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi</i>	-			-	<b>320.000.000,00</b>					-		<b>320.000.000,00</b>	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</i>	-			-	320.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	-	320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				300 Orang	320.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<i>- Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah - Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba - Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan</i>	-			-	<b>595.000.000,00</b>						-	<b>595.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>	-			-	595.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	595.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				100 Orang	585.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		585.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif  3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	<b>J U M L A H</b>								<b>56.312.325.525,00</b>						<b>7.143.281.625,00</b>	





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Capaian realisasi anggaran di setiap program/ kegiatan menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pada tahun 2022 anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 6.281.305.240,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.053.753.527,00 atau terealisasi sebesar 96,58 %. Terjadi **efisiensi anggaran pada tahun 2022 sebesar 3,62%**.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 56.312.325.525,- yang terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penguatan Ideologi

Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial..

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG



  
DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002